

BAB II

Dinamika Hubungan Indonesia dan Jepang

Dinamika hubungan antara Indonesia dan Jepang telah terjalin ketika Indonesia belum dinyatakan atau memiliki status sebagai negara yang merdeka, sejak berada pada pemerintahan kolonial belanda. pada bab ini akan dijelaskan bagaimana Indonesia dan Jepang memulai hubungan pasca Perang Dunia II, ketika Jepang menjajah Indonesia. Serta membahas mengenai kebijakan-kebijakan Jepang terhadap Indonesia yang dianggap menyengsarakan rakyat Indonesia.

Pembahasan pada bab 2 ini akan mencoba menjelaskan mengenai sejarah dinamika hubungan Indonesia dan Jepang. hingga mengenai perkembangan hubungan Indonesia Jepang hingga perjalanannya pada masa orde lama, baru dan masa reformasi. Pada waktu itu kebijakan kebijakan Jepang terhadap Indonesia berbentuk perjanjian, kerjasama, konflik, dan program bantuan. Serta penjelasan mengenai diplomasi kebudayaan Jepang yang memulai untuk dijadikan sebagai alat utama bagi Jepang untuk menjalin dan membuka diri pada hubungan dunia internasional. Berikut penjelasan pada masa pemerintahan di Indonesia.

A. Masa Penjajahan Jepang di Indonesia

Seperti yang kita ketahui bahwa meledaknya Perang Dunia kedua membawa fenomena penting dalam sejarah mengenai dinamika hubungan Indonesia Jepang. Hubungan Jepang dan Indonesia telah terjalin sebelum Indonesia dinyatakan telah merdeka, dimana pada saat itu Indonesia termasuk dalam jajahan negara Jepang pada periode 1942- 1945. Pada periode tersebut Jepang mengambil alih kekuasaan belanda sebagai negara penjajah Indonesia sebelumnya. Pada tanggal 10

Januari 1942, Jepang menyerang Indonesia.¹ Disini Jepang awalnya membantu rakyat untuk mengusir belanda dari nusantara, namun pada akhirnya Jepang mencoba untuk menjajah dan berkuasa di Indonesia. Pada saat itu Jepang membuat 3 kebijakan utama untuk mendapatkan kekuasaan. 3 kebijakan tersebut adalah kebijakan politik pemerintahan, kebijakan sosial-ekonomi, dan kebijakan bahasa dan budaya. Dilanjutkan pada 15 Febuari 1942 pangkalan inggris di Singapura telah dikuasai oleh Jepang. dan pada tahun ini juga pasukan Jepang berhasil menduduki beberapa wilayah Indonesia yaitu adalah Pontianak, Makassar, Banjarmasin, Palembang dan Bali. Kemudian tak lama setelah itu pada 8 Maret 1942, Pemerintah Kolonial Belanda yang berada di Jawa menyerah kepada Jepang dan kekuasaan hindia belanda di ambil alih sepenuhnya oleh Jepang. kemudian Jepang memiliki program tujuan utama terhadap Indonesia adalah ,

1. Menghapus paham atau pengaruh Barat dari rakyat Indonesia
2. Memobilisasi masyarakat Indonesia demi mendapatkan kemenangan pada perang Asia Timur.

Dari dua program tujuan utama tersebut kemudian Jepang memulai untuk mebuat kebijakan baru untuk dapat menguntungkan Jepang dalam menghadapi Perang Dunia kedua dimana kebijakan tersebut banyak memakan korban rakyat Indonesia .

1. Kebijakan Pemerintahan dan Politik

Setelah itu, Era pendudukan Jepang di Indonesia telah dimulai. Kedatangan Jepang di Indonesia adalah ingin untuk menjadikan wilayah nusantara sebagai cadangan keperluan Jepang untuk membangun pembangunan industri, memberikan permasalahan baru bagi rakyat Indonesia namun. Penempatan

¹ Santoso ,Iwan .2004. *Tarakan The Pearl Harbour of Indonesia (1942-1945)*. Bekasi: Yayasan Indonesia Berdikari
Hal: 25

penguasaan wilayah Palembang mempunyai strategi penting terhadap pemerintahan Jepang, bertujuan untuk memisahkan wilayah Batavia yang menjadi pusat kedudukan pemerintah Belanda di Indonesia dan wilayah Singapura sebagai Pusat kedudukan pemerintah Inggris. Pasukan Jepang melakukan penyerangan ke Jawa meliputi wilayah Banten, Indramayu, kragan, yang dilanjutkan untuk menyerang batavia sebagai pusat kekuasaan Belanda pada 5 Maret 1942, dilanjtkan penyerangan terhadap bandung pada 8 Maret 1942, memberikan hasil pasukan belanda di Jawa menyerah kepada Panglima Bala Tentara Jepang Imamura pada 8 Maret 1942 di Kalijati, Subang. Dengan demikian, seluruh wilayah Indonesia sepenuhnya telah menjadi bagian dari wilayah kekuasaan penjajahan Jepang.

Sistem pemerintahan yang dianut oleh Jepang sangat berbeda dengan era penjajahan Belanda yang bersifat Pemerintahan Sipil, Sistem yang dianut oleh Jepang lebih mengedepankan sistem Militer. Pada wilayah Indonesia dibagi menjadi 3 pemerintahan Kedudukan. Pemerintahan militer Angkatan Darat ke-25 menguasai wilayah Sumatra yang berpusat di Bukittinggi. Pada Jawa, dikuasai oleh Pemerintahan Militer Angkatan Darat ke-16 yang berpusat di Batavia, Jakarta. Pemerintahan Militer Angkatan Laut Armada Selatan 2 menduduki Wilayah Indonesia bagian timur yang berpusat di Makassar. Pembagian antara Angkatan Laut dan Angkatan Darat terbagi antara wewenang kekuasaan Administrasi pendudukan, dan pada wilayah kaya SDA. Angkatan Darat menguasai wilayah Sumatra, sedangkan Angkatan Laut menguasai wilayah di Kalimantan. Ketiga pemerintahan ini bertujuan untuk mengawasi dari bangsa eropa yang ingin kembali menguasai Indonesia serta mengawasi rakyat Indonesia.

Setelah berhasil menaklukan Pemerintahan Kolonial Belanda di Indonesia, Pemerintah kolonial Jepang ingin memperkuat kedudukannya sebagai penguasa, dengan melakukan pendekatan terhadap tokoh masyarakat. Jepang

melakukan pengeluaran Undang-undang dalam penetapan sistem pemerintahan baru, melakukan penghapusan terhadap sistem pemerintahan kolonial belanda yang lama. Penghapusan tersebut agar menciptakan kondisi untuk memulihkan ketertiban, keamanan, serta untuk mengisi kekuasaan pada kedudukan yang kosong oleh pemerintahan Belanda. Usaha untuk menciptakan kondisi pemerintahan baru dinilai memiliki kekurangan dalam hal Sumber daya manusia, sehingga pemerintah Jepang juga merekrut tenaga bangsa Indonesia agar dapat memenuhi kekurangan tersebut. Ditambah dikeluarkannya penataan dengan dikeluarkannya undang-undang no. 28 mengenai aturan pemerintahan syu dan tokubtsu syi. Dengan adanya undang-undang tersebut pulau jawa terbagi dalam beberapa tingkatan pada wilayah yaitu,

1. Karesiden
2. Kotapraja
3. Kabupaten
4. Distrik atau kawedanan
5. Kecamatan
6. Dan kelurahan atau desa

Tingkatan diatas bertujuan untuk memudahkan Jepang dalam mengontrol serta mengawasi masyarakat Indonesia. Hingga saat itu dikenal dengan istilah RT dan RW yang hingga kini digunakan di Indonesia sebagai suatu struktur terkecil dalam kependudukan.

Hal ini juga memberikan peluang dan pengalaman bagi orang Indonesia untuk menjalankan pemerintahan walaupun dengan memiliki kewenangan yang sangat terbatas. Pada awalnya kedatangan tentara Jepang pada tahun 1942, mendapat sambutan positif dari masyarakat oleh karena itu, Pihak penguasa Jepang juga ingin dapat menggerakkan massa dalam melaksanakan kebijakan politik dan ekonomi untuk kepentingan kekuasaan Jepang. Pendekatan yang dinilai sangat penting pertama adalah para tokoh nasionalisme Indonesia yang ada sejak pemerintahan Kolonial Belanda dalam

mengobarkan aspirasi semangat kemerdekaan Indonesia agar terbebas dari penjajahan kolonial Belanda. Pendekatan ini mempunyai pengaruh luas dalam masyarakat Indonesia agar dapat menguntungkan posisi pemerintahan Jepang. Sebagai contoh penunjukan Ir Soekarno sebagai Departemen Urusan Umum dan Moh Yamin sebagai departemen propoganda.

Pendekatan kepada para tokoh Nasionalis ini dengan memberikan Janji serta jaminan untuk membantu Indonesia dalam mencapai kemerdekaannya. Faktor pendorong para tokoh nasionalis yang bersedia untuk bekerja sama dengan Jepang adalah karena menganggap kedatangan Jepang sebagai kebangkitan asia untuk melawan bangsa eropa. Kemenangan Jepang ketika berperang melawan Russia (pada tahun 1904-1905) telah dianggap sebagai awal mula kebangkitan nasionalisme bangsa Asia agar dapat mengalahkan bangsa Barat. Maka dari itu, para tokoh nasionalis akan mendapatkan harapan yang besar apabila Jepang membantu Indonesia dalam mencapai kemerdekaan. Pendekatan kedua adalah kepada tokoh-tokoh Islam, alasan mengapa pemerintah Jepang melakukan pendekatan kepada kelompok islam adalah karena kelompok islam memiliki dasar pemikiran agama yang anti terhadap Barat. Mengingat bahwa beberapa tokoh nasionalis mayoritas semua telah memperoleh pendidikan Belanda. Kelompok ketiga adalah, kelompok pemuda yang berasal dari lingkungan sosial yang berbeda. Pemuda pada daerah perkotaan dan perdesaan yang tersebar pada wilayah yang berbeda-beda. Pemikiran dasar pemuda ini dinilai juga belum mendapatkan binaan atau pendidikan dari pemikiran Barat, Sehingga lebih mudah dipengaruhi oleh propoganda.

Para pemuda dilatih dan di didik secara khusus pada *seishin* (semangat) atau *Bushido* (jiwa kesatria) yang menekankan untuk kehormatan dan kesetiaan kepada pemimpin. Perlunya penanaman sikap disiplin agar menghilangkan rasa rendah diri dan semangat jiwa budak pada

kemudian hari justru menguntungkan pemuda Indonesia. Yang dibuktikan pada perjuangan pemuda Indonesia dalam mempertahankan dan membela bangsa dan negara untuk memperoleh kemerdekaan Indonesia melawan pihak militer Jepang. pada peristiwa perang pasifik berbalik, memaksa Jepang untuk mengambil tindakan defensive/pertahanan, memaksa pemerintah Jepang untuk melatih dan mendidik kepada para pemuda untuk menjadi kekuatan pertahanan pada satu komando. Agar tujuan ini terwujud, pemerintah Jepang lebih gencar dan giat untuk menebarkan janji dan harapan untuk memperoleh kemerdekaan bangsa Indonesia.

Pihak Jepang juga mengerahkan anggota masyarakat untuk dilatih dan di didik menjadi kelompok semi militer atau militer. Dengan harapan mampu untuk mempertahankan wilayah Indonesia dari kemungkinan adanya serangan dari tentara sekutu. Pada tanggal 29 April 1943 secara resmi diumumkan terbentuknya dua organisasi pemuda bernama Seinendan dan Keibodan.² Bertujuan untuk dijadikan sebagai tenaga cadangan Jepang dalam menghadapi tentara sekutu yang hampir menguasai wilayah pertempuran pada perang pasifik. Seinendan terbuka bagi pemuda Indonesia yang memiliki usia antara 15- 25 tahun. Pada akhir perang pasifik, pemuda di pulau jawa diperkirakan terdapat 500 ribu orang yang dilatih menjadi anggota Seinendan. Memiliki kemampuan latihan militer, untuk dapat bertahan dan menyerang musuh. Seinendan tidak hanya melatih pemuda namun juga melatih para pekerja dan petani. Sedangkan, keibodan, merupakan organisasi yang membantu barisan kepolisian, bertugas untuk menjaga lalu lintas, mengamankan desa dll. Dengan anggota pemuda yang memiliki usia antara 20-35 tahun. Seluruh peserta anggota keibodan ini hanya

² Kementrian Kominfo, Monumen Pers Nasional, *Keibodan dan Seinendan*, (<https://mpn.kominfo.go.id/index.php/2011/10/03/keibodan-dan-seinendan-jawa-baroe-vol-8-hal-8-9-mei-2604/>), diakses pada Februari 07, 2019).

terdiri dari pemuda/laki-laki. Kedua organisasi ini dibentuk pada berbagai wilayah di seluruh Indonesia dengan memiliki tujuan yang sama.

Pada bulan April 1943 para pemuda Indonesia memperoleh kesempatan untuk dilatih sebagai militer membantu tentara Jepang, yang juga disebut sebagai *Heiho*. Heiho memiliki dibawah komando tentara Jepang yang berada pada angkatan darat dan angkata laut pada wilayah nusantara. Pemuda dengan usia 18-25 tahun, dengan memiliki syarat berpendidikan sekolah dasar (sekolah Rakyat), memiliki badan sehat, dan berkelakuan baik. Didalam pasukan heiho tidak ada penamaan terhadap pangkat kecuali terhadap orang Jepang. kemudian, PETA didirikan secara resmi pada tanggal 3 Oktober 1943, yang beranggotakan seluruh pemuda dan golongan masyarakat Indonesia. Memiliki tugas untuk melakukan pendidikan secara militer agar dijadikan sebagai Komandan Batalion, komandan Kompi, komandan Pleton, komanda Regu, dan Komandan Pasukan Sukarela. Perkembangan pembentukan PETA ini dikarenakan anggota PETA tidak merasa puas terhadap perlakuan maupun tindakan orang Jepang mengenai masyarakat maupun status yang dianggap lebih rendah dari tentara Jepang sehingga muncul pemberontakan. Yang terakhir adalah Fujinkai merupakan organisasi himpunan wanita yang memiliki usia 15 tahun. Bertugas untuk mengerahkan tenaga perempuan turut serta dalam memperkuat barisan pertahanan dengan mengumpulkan berupa dana wajib yaitu perhiasan, bahan makanan, minuman dll, Yang nantinya digunakan dalam berperang.

2. Kebijakan Sosial Ekonomi

Keadaan pasukan Jepang yang semakin terdesak pada hampir seluruh wilayah pertempuran dan keadaan ekonomi yang sulit menyebabkan pemerintah Jepang terpaksa mengerahkan semua kemampuan dan sumber daya untuk mendukung kebutuhan yang dibutuhkan dalam berperang. Masyarakat Indonesia juga dipaksa untuk menyerahkan semua apa yang dimiliki untuk kebutuhan perang tersebut. Hal ini

mengakibatkan mayoritas masyarakat Indonesia semakin menderita dan semakin miskin. Dalam rangka menghadapi dan menutup kemungkinan terhadap adanya serangan balik dari pihak sekutu, pemerintahan Jepang ingin membangun prasarana pertahanan yang membutuhkan biaya serta tenaga untuk terwujudnya pembangunan tersebut. Pemerintah Jepang kemudian membentuk “*Romusha*”.³

Karena kebutuhan akan tenaga kerja semakin dibutuhkan, pihak pemerintah Jepang mengerahkan seluruh tenaga sehingga terjadi perekrutan besar-besaran terhadap masyarakat sipil untuk ikut turut serta dalam melakukan pembangunan prasarana pertahanan dan infrastruktur lainnya yang dibutuhkan dalam berperang. Seperti pekerjaan pembuatan rel kereta api, mengangkut hasil perkebunan dan mengangkut hasil tambang (batu bara), hingga berkembang menjadi penggerakan tenaga “Paksa” dalam jumlah yang sangat besar. Tenaga pekerja dikirim pada Burma, Malaya, Vietnam dan sebagainya. Sebagian besar dari para tenaga tersebut adalah para Petani yang dipaksa untuk dijadikan tenaga Romusha tersebut. Untuk mendapatkan simpati masyarakat Indonesia terhadap romusha tersebut, Jepang menyebut romusha sebagai “Pahlawan atau prajurit dalam ekonomi”. Mengakibatkan

³ Amazon, “*Upaya Pemerintah Militer Jepang membentuk pemerintahan,*” (https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/50526914/pdf_4.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1550813103&Signature=4HHz45EnjXBUZaiFEqoQkoyD3d0%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DUpaya_Pemerintah_Militer_Jepang_Membentu.pdf, Diakses pada Februari 09,2019)

produksi pertanian menjadi menipis dan terjadi kelaparan secara besar-besaran.⁴

Selain diperlakukan secara buruk, tenaga kerja romusha dipaksa untuk melakukan kerja rodi tanpa makanan dan minuman bahkan perawatan yang memadai. Korban berjatuhannya diantaranya meninggal, menderita sakit dan kelaparan. Sejumlah 300 ribu orang yang dibawa dari pulau Jawa diperkirakan sekitar 70 ribu orang meninggal atau menderita akibat sakit. Untuk dapat memenuhi kekuatan dan kebutuhan perang, pemerintah Jepang juga mengeluarkan kebijakan ekonomi yaitu,

1. Pengambilan aset terhadap pemerintah Hindia Belanda

Aset yang ditinggalkan oleh pemerintah kolonial Belanda disita menjadi milik pemerintah pendudukan Jepang seperti bank, pabrik, pertambangan, sarana telekomunikasi, perusahaan transportasi dan tanah perkebunan.

2. Kontrol terhadap pertanian dan perkebunan milik rakyat

Terdapat beberapa tanaman perkebunan dan pertanian yang mendapat perhatian dari pemerintah pendudukan Jepang, seperti perkebunan kopi, teh, tembakau, karet dan kina. Yang dikategorikan sebagai keperluan yang memiliki keperluan yang kurang dalam perang sehingga digantikan dengan tanaman yang lebih menghasilkan bahan makanan.

⁴ Shigeru Sato, *War and Peasants: The Japanese Military administration and its impact on the Javanese peasantry*, March 1942-August 1945.

3. Kebijakan Moneter perdagangan.

Pemerintah kedudukan Jepang tetap menggunakan sistem mata uang gulden atau rupiah Hindia Belanda sebagai alat tukar menukar dalam perekonomian. Bertujuan agar harga-harga barang dapat dipertahankan seperti sebelum terjadinya perang.

4. Sistem Ekonomi dalam Perang

Dalam situasi perang, setiap daerah harus menetapkan sistem ekonomi autarki, yaitu suatu sistem ekonomi mengharuskan setiap daerah mengupayakan untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok secara mandiri, tanpa mengandalkan adanya bantuan dari daerah lainnya. Jadi setiap daerah mempunyai tugas pokok untuk dapat memenuhi kebutuhan agar dapat bertahan dan berusaha memproduksi suatu barang guna keperluan perang.

3. Kebijakan Bahasa Budaya

Kebijakan budaya dan bahasa di buat guna menghapus segala unsur budaya Barat yang melekat pada Masyarakat Indonesia, baik segi bahasa, kesenian, maupun budaya. Sejak awal mula kedatangan Jepang menginginkan penghapusan pengaruh barat pada wilayah Asia, termasuk pada Indonesia. Kedatangan Jepang membawa ajaran budaya dan bahasa baru bagi Indonesia yang beberapa ratus tahun telah dijajah oleh Kolonial Belanda. Jepang mengajarkan budayanya di Indonesia bertujuan untuk menyatukan wilayah Asia sehingga tidak adanya lagi baik dari pengaruh budaya barat, Eropa maupun Amerika.

1. Pada masa pendudukan Jepang, selain mengakibatkan efek negarif juga memiliki dampak yang positif dalam soal budaya dan bahasa. Setelah Jepang berhasil menduduki Indonesia, segala hal yang berbau barat dilarang pada semua tempat umum. Beralih menjadi bahasa Indonesia dan Jepang. pada waktu inilah bahasa Indonesia mengalami perkembangan. Pada tahun 1943,

Jepang memberikan izin untuk berdirinya komisi penyempurnaan bahasa Indonesia pada akhirnya membuahkannya 7.000 istilah bahasa Indonesia modern.⁵

2. Pada tanggal 1 April 1943 di Jakarta, Jepang mendirikan Keimin Bunka Shidosho (pusat kebudayaan), bertujuan untuk memwadahi aktivitas para budayawan Indonesia agar tidak memiliki tujuan yang menyimpang dari Jepang. Lembaga ini juga mengadakan pameran karya pelukis seperti Agus Djajasoeminta, Basuki Abdoellah, Otto Djaja Soetara, Kartono Joedokoesoemo dan Emira Soenassa. Pameran tersebut digelar pada tanggal 29 Agustus 1942. Selain itu, Jepang juga memfasilitasi R. Koesbini dan Colnel Simanjuntak untuk membentuk grup seni suara yang kemudian melahirkan lagu-lagu nasional Indonesia. Seperti Tanah Air Tumpah Darahku, dll. Pada Agustus 1943 Jepang kemudian juga membentuk Persatuan Aktris Film Indonesia (Persafi). bertujuan untuk mendorong artis profesional dan amatir Indonesia melakukan eksperimen mementkan lakon terjemahan bahasa asing kepada bahasa Indonesia.⁶

B. Masa berakhirnya Perang Dunia II

Menurut sejarah dalam Perang Dunia II pada tahun 1939-1945, Perang Dunia kedua berakhir dengan peristiwa serangan Amerika yaitu serangan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki.⁷ Momen ini dimanfaatkan oleh Indonesia untuk

⁵ Sartono Kartodirdjo. 1975:181

(http://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/4886/5/T1_152010011_BAB%20IV.pdf. diakses pada 10 Februari 2019)

⁶ PARFI /Persatuan Artis Film Indonesia, *Sekilas Tentang PARFI*. (<http://www.parfi.or.id/2017/04/25/sekilas-tentang-parfi/>. diakses pada Februari 10, 2019)

⁷ Iqbal, Akhmal. 2010. *Perang-perang paling berpengaruh di Dunia, Perang kemerdekaan Indonesia*. Yogyakarta : Jogja Bangkit Publisher. Hal: 134-135.

mencapai kemerdekaan negara. Pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia akhirnya menyatakan proklamasi kemerdekaan agar terbebas dari jajahan Jepang maupun negara lainnya. Sejak saat itu Indonesia mulai untuk membangun sistem pemerintahan dengan presiden pertama Ir. Soekarno beserta wakilnya Moh. Hatta. Sejak berakhirnya PD-2 Jepang berupaya untuk menjalin hubungan antar negara-negara dunia untuk memunculkan persepsi positif di mata Internasional, Khususnya negara Indonesia. Hingga saat itu, Jepang menyerah kepada pihak sekutu tanpa syarat. Jepang berada dalam pemerintahan Amerika Serikat meletakkan dasar-dasar konstitusi masyarakat Jepang Pasca perang. Melalui pasal 9 konstitusi Jepang yaitu melarang penggunaan instrumen militer dan pengiriman tentara ke luar negeri, mendudukkan Jepang di bawah perlindungan Amerika Serikat. Melakukan demiliterisasi kepada Jepang yang dirancang oleh pemerintahan Amerika Serikat. Jepang kemudian menggukon pada Jalan Yoshida “Yoshida Doctrine”, yaitu melakukan konstentrasi secara penuh kepada pembangunan ekonomi serta membatasi gerakan politik dan militer dalam hubungan internasional.

Seperti yang kita ketahui bahwa tindakan yang dilakukan Jepang pada sejarah Perang Dunia ke dua secara militer dan invasi telah menimbulkan luka yang mendalam bagi negara-negara tetangganya, khususnya Korea dan China. Hubungan Jepang pada kawasan asia timur laut cenderung kurang harmonis karena penjajahan Jepang di masa lalu tersebut. Kemudian, Jepang lebih memilih kawasan Asia Tenggara sebagai basis regional politik luar negeri Jepang.

C. Masa Orde Lama

Pertengahan tahun 1951, Amerika Serikat memprakarsai pertemuan di San Francisco untuk merundingkan perjanjian damai dan mengenai rampasan perang dengan Jepang. pertemuan ini lebih dikenal dengan perjanjian San Francisco, yang secara resmi mengakhiri Perang Dunia ke-2 dengan beberapa negara, termasuk Indonesia. Indonesia sendiri pada

awalnya melihat fenomena ini dengan syarat bahwa disetujuinya kedatangan Indonesia apabila perjanjian ini memiliki manfaat bagi Indonesia.⁸ Menteri Luar Negeri Indonesia, Achmad Soebarjo berangkat menuju San Francisco pada 7 September 1951, sesaat sebelum acara penandatanganan kabinet telah mengambil suara, dengan hasil 10 menteri menyetujui perjanjian damai dan enam menteri menentang (+).

Awalnya, pemerintah Indonesia pada tahun 1952 menuntut rampasan perang terhadap Jepang sebanyak 17 Milyar dollar AS(+). Namun, Jepang merasa bahwa jumlah penuntutan tersebut terlalu besar. Pembicaraan ini berlanjut namun belum mencapai kesepakatan, hingga pada tahun 1955. Perundingan hingga tahun 1957. Pada tahun 1958, Jepang dan Indonesia secara resmi memulai hubungan diplomatik bilateral dan ditanda tangani perjanjian perdamaian antara Indonesia dan Jepang. perjanjian tersebut disertai perjanjian rampasan perang dimana Jepang membayar kerugian pada penjajahan Jepang di era Perang Dunia ke- 2. Telah disepakati bahwa rampasan perang yang diberikan Jepang kepada Indonesia adalah berjumlah 223 juta dollar AS. Tipe bantuan yang diberikan berupa bantuan teknis atau hibah, sedangkan bantuan tipe pinjaman (Yen) baru disalurkan pada tahun 1966, sekitar 10,8 Milyar Yen (+).

Hubungan Indonesia dan Jepang terus terjaga hingga pada datangnya fenomena demonstrasi anti modal asing pada tahun 1974, peristiwa tersebut lebih dikenal dengan peristiwa Malari (Malapetaka Limabelas Januari), demonstrasi tersebut digelar pada saat perdana Menteri Jepang Tanaka Kakuei berkunjung

⁸ Rim L& Pol'y J, Heinonline, "*The 1951 San Francisco Peace Treaty with Japan and The Territorial Disputes in East Asia*, 2002.

(https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/pacrimlp11&div=8&id=&page_ Diakses pada Febuari 12, 2019)

ke Jakarta pada tanggal 14 hingga 17 Januari 1974.⁹ Perdana Menteri Fukuda mempunyai peran penting dalam keberhasilan hubungan diplomatik Indonesia dan Jepang dengan mengenalkan Doktrin Fukuda pada tahun 1977. Bantuan *Official Development Assistance* (ODA) diperkenalkan di Indonesia. Bantuan ODA adalah program Jepang yang memiliki target terhadap Negara-negara berkembang berupa Dana atau bantuan yang diperlukan untuk pembangunan sosial ekonomi negara berkembang. Doktrin tersebut mempengaruhi pandangan masyarakat Indonesia bahwa Jepang memang menginginkan hubungan yang menguntungkan dan persahabatan diantara kedua negara tersebut. Esensi dari doktrin Fukuda mencakup tiga hal penting yaitu, pertama Jepang tidak menjadi negara adidaya militer. Kedua, Jepang akan menjalin hubungan dengan menggunakan rasa saling pengertian dan saling percaya terhadap negara Asia Tenggara. Ketiga, Jepang akan bekerja sama secara positif dengan seluruh negara ASEAN sebagai mitra. Bantuan ODA pertama kali telah dilakukan pada tahun 1954 melalui program pengiriman Trainee untuk mengajari masyarakat Indonesia pada bidang industri, pertanian, kesehatan dan transportasi komunikasi. Bantuan ini memberikan kontribusi yang besar pada bidang pengembangan SDM, dan pembangunan Infrastruktur sosial ekonomi Indonesia pada masa Orde Lama.

Jepang memiliki kedudukan penting bagi Indonesia, selain sebagai negara donor terbesar atau sebagai negara Investor. Demikian juga, Indonesia memiliki sumber daya hasil alam dan letak geografik dalam kepentingan ekonomi Jepang. dari segi kepentingan politik, hubungan Indonesia Jepang dapat dinilai memiliki dinamika naik dan turun dalam berhubungan, namun tidak memiliki permasalahan yang berarti.

⁹ Jurnal Sejarah, “*MALARI: Studi Gerakan Mahasiswa Masa Orde Baru*. (<http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/JA/article/view/902> . Diakses pada Februari 12, 2019).

D. Masa Orde Baru

Pada masa ini dimulai pada tahun 1966 hingga 1998, pada turunnya presiden Soekarno menjadi Presiden Soeharto. Perubahan ini tidak mengubah pola hubungan kedua negara dan tetap terjalin baik. Pada awal 1970, Meskipun menuai kontroversi dan menyatakan protes anti Jepang pada beberapa negara kawasan Asia Tenggara, termasuk negara Indonesia. Negara-negara anggota Asean cenderung ingin melupakan masa lalu Jepang dengan intervensi militer yang memakan korban pada negara-negara. Selain itu, diplomasi kebudayaan Jepang dimulai dan terdapat peran yang penting setelah Japan Foundation berdiri di Indonesia hingga masa kini.

Pada tahun 1970, tepatnya gelombang pertama investasi Jepang di Indonesia dimulai dengan masuknya industri Sparepart mesin kendaraan, yang menjadi tonggak awal berjayanya sebagai perusahaan transportasi Jepang di Indonesia. Pada awal 1970, orde baru menjadi suatu peristiwa fenomena dimana Indonesia menyatakan protes anti Jepang atau lebih dikenal dengan peristiwa Malari. Merupakan satu-satunya konflik yang pernah terjadi antara Jepang dan Indonesia terkait dengan hubungan diplomatik. Peristiwa Malari (atau lebih dikenal dengan Malapetaka lima belas Januari) tahun 1974 merupakan peristiwa yang membuat hubungan kedua negara mengalami masalah. Berawal pada kedatangan perdana menteri Jepang pada 15 Januari 1974, yaitu Tanaka Kakuei melakukan kunjungan ke Indonesia untuk kembali menanamkan modal Jepang di Indonesia. Kunjungan perdana menteri disambut dengan para mahasiswa dan masyarakat dengan melakukan demonstrasi di depan bandara Halim perdanakusuma. Bandara pada saat itu dijaga keamanannya dengan ketat oleh aparat. Hingga demonstran turun pada jalanan Jakarta melakukan demo yang dimulai berbagai tindak kekerasan, pembakaran, yang dilakukan. (Semasa Perang dingin negara-negara ASEAN menjadi sekutu Jepang dan Amerika dalam menghadapi perluasan paham Uni Soviet dan China pada kawasan Asia Tenggara.)

Peristiwa Malari ini merupakan sebuah penolakan mahasiswa terhadap kebijakan penanaman modal asing. Penolakan berdasarkan bahwa modal asing yang diberikan kepada Indonesia berada di luar batas dan sangat merugikan rakyat kecil, kehadiran modal asing yang tumbuh tersebut bagi pembanguna Indonesia berpotensi untuk mematikan pengusaha lokal kecil yang ingin untuk berkembang. Mahasiswa memberikan 3 tuntutan terhadap pemerintah Indonesia, pertama, mengenai pemberantasan korupsi. Kedua, perubahan kebijakan ekonomi mengenai modal asing. Dan ketiga, mengenai pembubaran Lembaga Asisten Pribadi Presiden. Hingga puncaknya pada 15 Januari 1974, ketika Perdana Menteri Tanaka kakuei melakukan kunjungan ke Indonesia.

Perdana Menteri Tanaka dianggap sebagai simbol dari modal asing yang perlu dihilangkan pada Indonesia. Karena Jepang dianggap sebagai pemeras ekonomi Indonesia mengambil lebih dari 53% ekspor (diantaranya 71% berupa Minyak) dan memasok 29% impor pada Indonesia. Selain itu investasi Jepang yang bertambah seiring waktu di Jawa dianggap sebagai mematikan usaha para pengusaha pribumi. Dampak dari peristiwa Malari ini merugikan bagi negara diantaranya pembangunan wilayah pertokoan senen pada kawasan Ibukota hangus terbakar mencapai angka kerugian 2,7 Milyar Rupiah. Selain itu berupa 807 Mobil dan 187 sepeda motor rusak dan terbakar. 144 buah gedung rusak hingga terbakar, dan sejumlah 160 KG emas hilang dari sejumlah toko perhiasan. selain kerusakan infrastruktur, korban jiwa pada peristiwa ini tercatat terdapat 11 orang meninggal diantaranya, 300 luka-luka, 775 orang ditahan atas peristiwa ini . Diduga pemimpin dari mahasiswa ini yaitu Hariman Siregar yang menjabat sebagai dewan mahasiswa Universitas Indonesia serta beberapa mahasiswa lainnya yaitu, Sjahrir, Yap Thiam Hien, Mohtar Lubis, Rahman Tolleng, dan Aini Chalid. Perisrtiwa Malari juga disebut sebagai salah satu demontran terbesar pada saat Presiden Soeharto berkuasa. Pada kesimpulanya peristiwa ini menjadi bukti nyata

mengenai Jepang bahwa masyarakat Indonesia belum dapat menerima bantuan dari Jepang pada saat itu.

Pada peristiwa Malari tahun 1974, Jepang menyadari bahwa masyarakat Indonesia masih mengingat kembali mengenai penjajahan Jepang yang membuat kebencian masyarakat Indonesia kepada Jepang belum terobati. Kemudian Jepang merubah bentuk pendekatan kepada Indonesia tidak cukup melalui pemerintahan, tetapi perlu melakukan pendekatan kepada masyarakat Indonesia. Pendekatan melalui budaya dianggap sebagai senjata yang ampuh bagi Jepang untuk memperbaiki citra Jepang di mata masyarakat Indonesia. Pendekatan budaya tersebut dilakukan dengan melakukan promosi budaya Jepang kepada masyarakat Indonesia. Jepang menggunakan budaya sebagai diplomasi agar masyarakat paham dan sebagai ajang promosi mengenai produk-produk Jepang. Tujuan diplomasi sebelum berakhir pada masa orde baru, Tahun 1990 tercatat bahwa Jepang kembali melakukan gelombang Investasi kedua terhadap Indonesia melalui sektor Industri manufaktur.

Pada masa Orde baru tepatnya pada tahun 1972, berdiri organisasi yang bergerak khusus pada bidang Kebudayaan Jepang, memiliki tujuan untuk memperkenalkan Jepang lebih dekat kepada Indonesia yaitu Japan Foundation membuka cabangnya di Jakarta pada tahun 1974. Berdirinya Japan Foundation memiliki peran yang penting terhadap hubungan diplomatik antara Jepang dan Indonesia. Peran Japan Foundation di Indonesia nantinya akan dibahas pada bab berikutnya dalam penulisan ini.

E. Masa Reformasi

Masa reformasi terjadi pada tahun 1990 hingga saat ini. Bergantinya sistem pemerintah Indonesia tidak memberikan banyak pengaruh bagi hubungan antar kedua negara, Jepang menjalin kerjasama baik dengan Indonesia melalui bantuan dana. Yang dimana pada awal reformasi Indonesia mengalami masalah internal, selain itu pada perjanjian Economic

Partnership Program (EPA) antar kedua negara. disini peran budaya sebagai penengah atau penyeimbang dala hubungan terlihat dengan jelas dengan berbagai festival dan kegiatan yang membicarakan kebudayaan Jepang diselenggarakan di Indonesia dan juga sebaliknya.

1. Kerjasama Ekonomi

Namun, berbagai bantuan dan kerjasama terjalin antara Indonesia Jepang. pada masa reformasi bantuan Jepang melalui ODA memiliki peran dalam memulihkan Krisis Moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1998, yaitu berupa pinjaman khusus kepada pemerintah Indonesia. Berikut tabel statistik bantuan ODA yang diberikan Jepang terhadap Indonesia pada tahun 1960 hingga 2006.

Tabel 2.1
Bantuan ODA Jepang Terhadap Indonesia¹⁰

Tahun	Pinjaman Yen	Bantuan Hibah	Kerjasama Teknik	Total	Referensi	
					APBN	GDP
					Indonesia	Indonesia
1960	-	14,28	-	14,38	n.a.	n.a.
1961	-	30,81	-	30,81	n.a.	n.a.
1962	-	22,04	-	22,04	n.a.	n.a.
1963	-	17,93	-	17,93	n.a.	n.a.
1964	-	15,01	-	15,01	n.a.	n.a.
1965	-	21,52	-	21,52	n.a.	n.a.
1966	22,43	27,86	0,29	50,38	n.a.	n.a.
1967	91,73	20,73	0,47	112,93	543,51	5.667,76
1968	53,31	30,42	-	83,73	467,94	7.076,47
1969	56,9	7,34	1,6	65,84	1.004,35	8.338,34
1970	101,79	24,16	2,89	128,84	1.226,18	9.205,89
1971	110,26	12,09	2,77	125,12	1.493,36	9.370,33
1972	109,63	7,04	4,48	121,15	1.811,08	10.99,59
1973	141,78	3,62	7,08	152,48	2.078,07	16.273,25
1974	216,38	8,78	7,44	232,6	3.800,72	25.802,41
1975	198,88	0,43	10,32	209,63	6.589,64	30.463,86
1976	205,56	0,83	12,02	218,41	8.483,37	37.269,16
1977	153,08	8,15	16,05	177,28	10.234,46	45.808,92

¹⁰ Japan Official Development Assistance,” *Nilai Realisasi Bantuan ODA Jepang di Indonesia*. (https://www.id.emb-japan.go.jp/oda/id/datastat_01.htm. Diakses pada Januari 25, 2019).

1978	237,47	14,33	25	276,8	10.918,12	51.456,30
1979	242,3	19,94	23,65	285,89	11.129,03	51.440,60
1980	366,87	26,51	32,71	426,09	16.837,32	72.481,87
1981	329,43	15,05	37,34	381,82	22.002,61	92.008,79
1982	332,65	19,47	37,18	389,3	23.596,62	94.456,78
1983	293,14	20,04	39,99	353,17	18.218,45	85.368,95
1984	212,65	30,03	43,66	286,34	20.040,55	87.612,34
1985	206,41	31,06	45,28	282,75	20.751,32	88.607,75
1986	227,54	46,75	63,07	337,36	16.702,22	86.309,41
1987	804,55	68,71	67,88	941,14	13.859,54	78.249,23
1988	1.121,50	49,4	93,79	1.264,69	17.182,18	88.624,90
1989	1.260,57	44,66	101,82	1.407,05	20.663,14	101.470,01
1990	964,81	58,39	108,68	1.131,88	23.265,01	114.426,34
1991	1.169,73	79,73	133,07	1.382,53	25.921,39	128.168,20
1992	1.469,06	85,73	141,72	1.696,51	27.640,99	139.116,32
1993	1.303,45	67,61	157,93	1.528,99	29.860,57	158.006,80
1994	1.084,37	72,28	177,69	1.334,34	32.280,00	176.892,28
1995	1.155,14	66,47	203,67	1.425,28	34.698,77	202.131,09
1996	1.234,15	64,41	163,31	1.461,87	38.686,76	227.369,68
1997	739,61	66,57	148,39	954,57	34.745,20	215.784,72

1998	1.034,5 1	114,6	123,99	1.273,1 0	26.352, 96	95.445,4 9
1999	1.994,0 4	100,54	130,8	2.225,3 8	27.007, 65	140.001, 15
2000	945,66	52,07	144,6	1.142,3 3	23.395, 29	165.020, 93
2001	702,83	45,16	117,27	865,26	30.772, 74	164.145, 54
2002	441,59	63,54	126,46	631,59	36.945, 76	200.110, 83
2003	946,77	82,36	120,66	1.149,7 9	43.206, 99	237.416, 25
2004	452,52	25,47	105,96	583,95	41.879, 10	256.837, 29
2005	1.072,1 8	172,21	98,4	1.342,7 9	40.987, 08	286.969, 05
2006	882,83	60,67	91,11	1.034,6 1	70.771, 36	364.459, 37
Tota l	24.690, 06	1.939, 16	2.907,4 9	29.597, 35	-	-

Dari data statistik di atas, dapat di lihat bagaimana peran bantuan Jepang melalui ODA pada setiap tahunnya memberikan bantuan terhadap Indonesia baik dari segi, pinjaman, Yen, Dana Hibah maupun Kerjasama Teknik. Dalam tabel tersebut dicatatkan berbagai Bantuan Jepang hingga tahun 2006.

Selain bantuan ODA, tahun 2007 Jepang dan Indonesia menyepakati perjanjian *economic partnership agreement* atau EPA Indonesia Jepang. perjanjian tersebut membahas mengenai Indonesia dan Jepang dalam hal perdagangan dan penanaman modal, melalui EPA- IJ memberikan sebuah kesempatan untuk melakukan ekspor- impor dengan tarif yang rendah mencapai angka.

2. Kerjasama Budaya & Kesenian

. Diawali pada tahun 2008 terdapat “Tahun Penyelenggaraan Indonesia dan Jepang” untuk merayakan moment 50 tahun terjalannya hubungan antara Indonesia dan Jepang. Bertujuan untuk lebih mendekatkan masyarakat Indonesia terhadap Jepang melalui sarana budaya dan kesenian Pemerintah Jepang melakukan upaya untuk kembali memperkenalkan Jepang kepada masyarakat Indonesia melalui sektor bahasa, budaya, dan kesenian. Karena itu, peran budaya menjadi faktor penting untuk lebih mendekatkan hubungan kedua negara.

Keseriusan Jepang dalam hal Kerjasama kebudayaan dapat terlihat melalui Festival kebudayaan Jepang terbesar di Indonesia yang diselenggarakan pada tahun 2009. Yaitu adalah *Jak-Japan Matsuri*.¹¹ Diselenggarakannya festival ini bertujuan untuk menambah minat dan ketertarikan masyarakat Indonesia terhadap masyarakat Jepang di Jakarta. melalui penyelenggaraan pameran budaya yang dianggap mampu untuk menjaga keseimbangan antara masyarakat dan pemerintah Indonesia. Selain itu dengan adanya perayaan *Jak Japan Matsuri* dianggap sebagai simbol persahabatan Jepang dan Indonesia. *Jak-Japan Matsuri* berharap diselenggarakannya festival ini masyarakat Indonesia yang berada di Jakarta tertarik untuk mempelajari budaya Jepang demikian juga sebaliknya. *Jak Japan Matsuri* memiliki dan menetapkan Tema yaitu “Indonesia and Japan Always Together”.

Dalam perayaan *Jak Japan Matsuri* pada tahun 2013, Duta Besar Jepang Yoshinori Katori dan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo turut andil untuk membahas dan merencanakan digelarnya festival *Jak Japan Matsuri* untuk menciptakan dan menjaga Persahabatan Indonesia Jepang. dari kedua kerjasama diatas tahun 2013 tercatat, bahwa 55 tahun hubungan

¹¹ JAK-JAPAN Matsuri 2018, “*About JJM*,” (<https://www.jakjapanmatsuri.id/about.html>). Diakses pada Februari 19, 2019)

Indonesia dan Jepang, terdapat lebih dari 1400 perusahaan asing milik Jepang yang beroperasi di Indonesia telah menyediakan 300.000 lapangan pekerjaan. Terdapat 14.000 warga Jepang telah tinggal di Indonesia. Dan sebaliknya, terdapat sekitar 24.000 warga negara Indonesia telah tinggal di Jepang dan terdapat sekitar 85.000 masyarakat Indonesia mempelajari bahasa Jepang, jumlah angka tersebut merupakan terbesar di Asia Tenggara dan menempati urutan peringkat ke-6 di Dunia dalam hal pelajar yang mempelajari bahasa Jepang pada negara lain.

Dari yang telah diuraikan pada bab ini, dinamika hubungan Jepang dan Indonesia telah terjalin sejak masa penjajahan Jepang, pada waktu itu Jepang membentuk 3 kebijakan utama yang menentukan dan sangat mempengaruhi kepada masyarakat Indonesia. Pada 3 kebijakan utama Jepang ketika telah menjajah Indonesia, kebijakan bahasa dan budaya merupakan terpenting yang bertujuan untuk menghapuskan pengaruh dan budaya barat yang ada dan melekat pada masyarakat Indonesia, sehingga menciptakan rasa persatuan antar wilayah Asia. Namun, penjajahan Jepang menimbulkan penyesalan dan penderitaan bagi masyarakat Indonesia hingga menimbulkan rasa trauma dan citra yang buruk terhadap Jepang.

Setelah berakhirnya Perang Dunia kedua dan kemerdekaan Indonesia, Hubungan antara Indonesia Jepang tetap terjalin dan berlanjut pada perjanjian damai dan rampasan perang pada tahun 1950. Setelah itu Jepang banyak membantu Indonesia melalui berbagai dana bantuan dan investasi hingga menimbulkan peristiwa Malari yang mengakibatkan trauma oleh masyarakat Indonesia pada masa lalu atau masa penjajahan. Terlepas dari peristiwa Malari, hingga pada tahun 2013, pada 55 tahun memperingati hubungan Indonesia dan Jepang yang terbentuk dalam berbagai perjanjian yang dinilai akan menguntungkan keduanya, seperti bantuan *Official Development Assistance* (ODA) dan *Economic Partnership Agreement* (EPA) yang terjalin dan disepakati antar keduanya.

Sedangkan pada kerja sama membahas Kebudayaan, adanya festival *Jak-Japan Matsuri* memiliki peran dalam hal Pertukaran Bahasa, Budaya dan Kesenian pada masa reformasi tersebut. Diselenggarakannya festival *Jak-Japan Matsuri* agar menciptakan dan menjaga hubungan yang harmonis antara Indonesia dan Jepang. dibuktikan dalam pelaksanaannya festival tersebut Duta Besar Jepang, Yoshinori Katori dan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo memainkan peran dalam mengenalkan dan melakukan pertukaran mengenai kedua budaya negara.

Kemudian Pemerintah Jepang menginginkan untuk lebih memperkenalkan kepada masyarakat Indonesia mengenai Jepang melalui Diplomasi kebudayaan. Pengenalan terhadap Jepang melalui agenda festival Kebudayaan, pameran dan kegiatan mengenai kebudayaan yang diselenggarakan di Indonesia juga mulai terlihat, senjata Jepang dalam menggunakan Kebudayaannya merupakan cara Jepang untuk memperkenalkan dan mendekatkan kembali kepada masyarakat Indonesia atas citra Jepang yang buruk pada masa penjajahan. Maka pemerintah Jepang lebih ingin mendekatkan kepada masyarakat dan pemerintah Indonesia sebagai penyeimbang terhadap kerjasama yang sebelumnya terjalin. Kemudian pemerintah Jepang mendirikan sebuah Lembaga yang fokus tujuannya membahas mengenai Sosial-budaya. Diplomasi kebudayaan Jepang di Indonesia akan dijelaskan pada bab selanjutnya.